

## GLOBALISASI *DIGITAL* DAN *SHADOW EDUCATION* DALAM EKONOMI PENDIDIKAN DASAR INDONESIA

Alhidayatuddiniyah T. W.<sup>1</sup>, Rina Marlia<sup>2</sup>,  
Yan Noviar Nasution<sup>3</sup>

Program Studi Teknik Informatika<sup>1,2</sup>

Program Studi Ilmu Manajemen<sup>3</sup>

Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia<sup>1,2</sup>

Universitas Pakuan, Indonesia<sup>3</sup>

Correspondent Author: [alhida.dini@gmail.com](mailto:alhida.dini@gmail.com)<sup>1</sup>,

Authors Email: [rinamarlia629@gmail.com](mailto:rinamarlia629@gmail.com)<sup>2</sup>,

[yannoviar2009@gmail.com](mailto:yannoviar2009@gmail.com)<sup>3</sup>

**Received:** January 10, 2026. **Revised:** March 20, 2026. **Accepted:**  
April 10, 2026. **Issue Period:** Vol.10 No.2 (2026), Pp.676-687

**Abstrak:** Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam ekonomi pendidikan dasar di Indonesia, terutama melalui penetrasi platform pembelajaran digital dan berkembangnya shadow education. Kedua kanal tersebut tidak lagi sekadar berfungsi sebagai inovasi pedagogis, melainkan bertransformasi menjadi mekanisme pasar pendidikan yang memengaruhi struktur biaya, pola konsumsi pendidikan rumah tangga, serta relasi peran antara negara, sekolah, dan aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap ekonomi pendidikan dasar, mengidentifikasi bentuk kebocoran nilai tambah (value leakage), serta merumuskan strategi penangkapan nilai tambah (value capturing) yang kontekstual bagi sistem pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian konseptual-kebijakan berbasis studi literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah dan laporan lembaga internasional periode 2016–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan dasar mulai berfungsi sebagai arena kebocoran nilai tambah, di mana nilai ekonomi yang dibentuk oleh anggaran publik, kerja pendidik, waktu belajar murid, serta data pendidikan tidak sepenuhnya bertahan dalam sistem pendidikan nasional, melainkan mengalir ke aktor pasar melalui model layanan berlangganan, ketergantungan platform, dan komodifikasi pembelajaran. Shadow education teridentifikasi sebagai bentuk globalisasi “tak kasatmata” yang memperkuat ketimpangan berbasis daya beli, sementara data pendidikan dasar muncul sebagai sumber nilai ekonomi baru yang strategis namun berisiko melemahkan kedaulatan pendidikan apabila tidak dikelola melalui tata kelola yang kuat. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan agar globalisasi pendidikan dasar tetap berorientasi pada kepentingan publik, pemerataan mutu, dan keadilan sosial melalui regulasi platform, perlindungan data pendidikan, serta penguatan kapasitas sekolah sebagai penyedia utama layanan pendidikan dasar.

**Kata kunci:** Globalisasi pendidikan; Ekonomi pendidikan; Pendidikan dasar; Platform pembelajaran digital; Shadow education.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Abstract:** Globalization has brought significant changes to the economics of primary education in Indonesia, particularly through the penetration of digital learning platforms and the expansion of shadow education. These two channels no longer function merely as pedagogical innovations, but have increasingly evolved into market mechanisms that shape education cost structures, household education consumption patterns, and the shifting roles among the state, schools, and non-state actors. This study aims to analyze the impact of globalization on the economics of primary education, identify forms of value leakage, and formulate contextual strategies for value capturing within the national education system. The research adopts a qualitative approach through a conceptual and policy-oriented literature review, drawing on systematic analysis of scholarly publications and reports from international organizations published between 2016 and 2026. The findings indicate that primary education is increasingly becoming a site of value leakage, where economic value generated from public funding, teachers' labor, students' learning time, and education data does not remain fully within the national education system but instead flows toward market actors through subscription-based services, platform dependency, and the commodification of learning. Shadow education is identified as an "invisible" form of globalization that reinforces inequality based on purchasing power, while primary education data emerges as a new strategic source of economic value that may undermine education sovereignty if not governed through robust regulatory frameworks. This study emphasizes the urgency of policy interventions to ensure that globalization in primary education remains oriented toward the public interest, equitable quality improvement, and social justice through platform regulation, education data protection, and strengthening schools' capacity as the primary providers of basic education services.

**Keywords:** Education globalization; Economics of education; Primary education; Digital learning platforms; Shadow education.

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi digital telah mengubah struktur ekonomi dan sosial secara masif, termasuk pada sektor pendidikan dasar di Indonesia. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran tidak lagi sekadar inovasi, tetapi telah menjadi indikator penting efektivitas layanan pendidikan dan daya saing sumber daya manusia. Pada konteks ekonomi pendidikan, digitalisasi memunculkan "pasar" baru berupa layanan pendidikan berbasis platform, perangkat pembelajaran digital, serta ekosistem pembelajaran privat yang semakin berorientasi komersial. Transformasi ini menandai bahwa pendidikan dasar tidak hanya menjadi proses pedagogis, melainkan juga arena ekonomi yang dipengaruhi oleh logika globalisasi [1]

Akselerasi transformasi digital pendidikan di Indonesia semakin menguat sejak pandemi COVID-19, yang memaksa sistem pendidikan beradaptasi melalui pembelajaran jarak jauh. Namun, adaptasi tersebut tidak selalu berjalan merata karena perbedaan kemampuan institusi dan rumah tangga dalam mengakses TIK. Akibatnya, teknologi tidak hanya berperan sebagai alat peningkat mutu, tetapi juga berpotensi memperluas ketimpangan pendidikan. Dalam kerangka ekonomi pendidikan, kondisi ini mengindikasikan bahwa input pendidikan (akses perangkat, internet, literasi digital) menjadi faktor produksi penting yang menentukan output Pendidikan [2]

Kesenjangan digital (*digital divide*) menjadi persoalan struktural dalam pendidikan dasar karena memengaruhi kesempatan belajar antarwilayah dan antarkelompok sosial. Wilayah perkotaan cenderung memiliki akses internet dan infrastruktur digital yang lebih baik dibanding wilayah perdesaan atau daerah 3T. Ketimpangan akses tersebut menimbulkan biaya peluang (*opportunity cost*) yang besar bagi anak usia sekolah dasar, karena hilangnya kesempatan belajar yang berkualitas pada masa penting pembentukan kompetensi literasi dan numerasi. Kondisi ini memperjelas bahwa pendidikan dasar merupakan investasi modal manusia (*human capital investment*) yang sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi.



Selain akses, kualitas pemanfaatan teknologi juga menentukan terjadinya ketidaksetaraan pembelajaran. Penelitian tentang kesenjangan digital modern menunjukkan bahwa dimensi digital divide tidak berhenti pada kepemilikan perangkat, tetapi juga meliputi literasi digital dan pola penggunaan teknologi. Siswa dengan kemampuan digital yang lebih tinggi dapat memanfaatkan platform belajar secara produktif, sedangkan siswa lain hanya menjadi pengguna pasif atau bahkan tertinggal. Hal ini memperkuat argumen bahwa globalisasi digital tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan apabila tidak disertai strategi pemerataan kompetensi [3]

Di tengah perubahan tersebut, terjadi ekspansi “shadow education” atau pendidikan bayangan, yaitu layanan pendidikan tambahan di luar sekolah formal (misalnya les privat, bimbingan belajar, kursus online) yang biasanya berbayar dan mengikuti kurikulum sekolah. Konsep shadow education menegaskan bahwa ketika sistem pendidikan formal berkembang, layanan pendidikan tambahan juga ikut tumbuh mengikuti kebutuhan dan tekanan kompetisi akademik. Fenomena ini telah lama menjadi perhatian ilmiah internasional karena berkaitan erat dengan reproduksi ketimpangan social [4]

Dalam ekonomi pendidikan, shadow education dapat dipahami sebagai bentuk investasi rumah tangga dalam meningkatkan probabilitas keberhasilan pendidikan anak. Orang tua menambah pengeluaran pendidikan untuk memperoleh keuntungan akademik (academic advantage), seperti peningkatan nilai, peluang masuk sekolah unggulan, maupun kesiapan ujian. Namun, investasi ini bersifat selektif karena bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, shadow education berpotensi memunculkan dualisme: siswa dari keluarga mampu memperoleh “tambahan modal belajar”, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu bergantung sepenuhnya pada sekolah formal.

Globalisasi digital kemudian mengubah wajah shadow education menjadi lebih luas dan lebih agresif. Jika pada masa sebelumnya shadow education banyak berbentuk bimbingan belajar tatap muka, kini berkembang menjadi layanan berbasis aplikasi, video pembelajaran berlangganan, tutor online, dan paket belajar digital. Platform digital juga menggunakan strategi ekonomi platform (subscription model, freemium, iklan) yang mendorong komersialisasi pendidikan secara lebih sistematis. Perubahan ini memperlihatkan bahwa globalisasi digital tidak hanya memmodernisasi pendidikan formal, tetapi juga memperkuat pendidikan privat sebagai industri.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai fungsi sekolah dasar sebagai institusi publik. Ketika shadow education semakin dominan, sekolah berisiko mengalami “fungsi substitusi”, yaitu ketergantungan siswa pada tutor atau platform privat untuk mencapai standar kompetensi. Padahal, sekolah seharusnya menjadi institusi utama penyedia layanan pendidikan dasar secara merata. Situasi ini mengarah pada pergeseran tanggung jawab dari negara ke rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat yang mampu membayar pendidikan tambahan.

Pada saat yang sama, digitalisasi pendidikan juga memunculkan berbagai tantangan tata kelola (*governance*) dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan tidak hanya menyangkut perangkat, namun juga aktor dan proses kebijakan termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, sekolah, guru, serta masyarakat. Penguatan ekosistem digital pendidikan tanpa regulasi yang tepat dapat membuka ruang komersialisasi berlebihan serta ketimpangan akses layanan, khususnya pada pendidikan dasar yang seharusnya menjamin pemerataan [5]

Dalam ranah sosial-ekonomi, efek globalisasi digital terhadap pendidikan dasar memiliki dimensi mobilitas sosial. Akses terhadap pembelajaran digital dan pendidikan tambahan berpotensi meningkatkan peluang siswa memperoleh kompetensi masa depan, namun hanya jika akses tersebut merata. Jika tidak, digitalisasi justru memperkuat stratifikasi sosial melalui perbedaan kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa. Dengan demikian, kebijakan pemerataan akses dan literasi digital berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah pendidikan menjadi mekanisme ketimpangan antar generasi [6]

Relevansi isu ini semakin kuat di Indonesia karena pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan modal manusia, serta menjadi fase pembentukan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Ketika terjadi ketidaksetaraan pada fase dasar, maka dampaknya dapat berlangsung panjang dan memengaruhi capaian pendidikan berikutnya. Oleh sebab itu, memahami hubungan globalisasi digital dan shadow education di tingkat pendidikan dasar menjadi penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan berkeadilan.

Kajian global juga menunjukkan bahwa shadow education tumbuh kuat ketika terdapat tekanan kompetisi akademik, ketimpangan kualitas sekolah, dan persepsi bahwa sekolah formal belum cukup memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dalam konteks Asia, fenomena ini sering dipengaruhi oleh budaya prestasi dan kebutuhan kompetitif. Meskipun situasi Indonesia memiliki karakteristik berbeda dibanding negara Asia Timur,



kecenderungan bertambahnya bimbel dan kursus digital di Indonesia menunjukkan pola yang serupa: peningkatan permintaan layanan privat karena dorongan hasil akademik dan akses teknologi [7]

Pada level mikro, rumah tangga menghadapi dilema ekonomi: tetap mengandalkan sekolah atau menambah pengeluaran pendidikan untuk layanan privat. Sementara itu, sekolah menghadapi tantangan kesiapan guru, kecakapan digital, serta ketersediaan infrastruktur pembelajaran digital. Sejumlah studi menyatakan bahwa hambatan utama digitalisasi pendidikan terletak pada keterbatasan infrastruktur, kompetensi digital pendidik, dan dukungan kebijakan. Hambatan tersebut memperkuat alasan mengapa shadow education menjadi pilihan rumah tangga untuk “menggompensasi” keterbatasan sekolah [8]

Dengan demikian, topik globalisasi digital dan shadow education perlu ditempatkan dalam bingkai ekonomi pendidikan: sebagai relasi antara investasi pendidikan rumah tangga, mekanisme pasar jasa pendidikan, dan peran negara dalam menjamin pemerataan. Shadow education bukan sekadar fenomena pendidikan tambahan, tetapi memiliki konsekuensi ekonomi berupa pengeluaran pendidikan privat yang meningkat, diferensiasi kualitas pembelajaran, serta potensi ketimpangan hasil belajar. Di sisi lain, globalisasi digital berperan sebagai akselerator yang mempercepat pertumbuhan industri pendidikan privat melalui platform digital.

Oleh karena itu, penelitian tentang globalisasi digital dan shadow education dalam ekonomi pendidikan dasar Indonesia menjadi penting untuk menganalisis bagaimana transformasi digital memengaruhi perilaku pendidikan rumah tangga, bagaimana pendidikan privat bertransformasi menjadi industri berbasis teknologi, serta bagaimana ketimpangan akses dan kualitas belajar terjadi dalam pendidikan dasar. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kebijakan digitalisasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, agar transformasi digital tidak memperlebar kesenjangan pendidikan, melainkan menjadi pengungkit kualitas pendidikan dasar nasional [9]

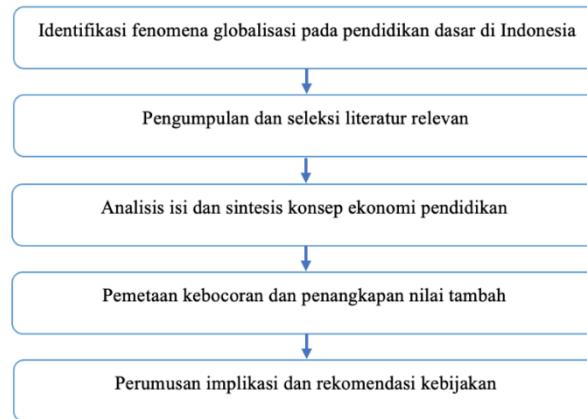
## II. METODE DAN MATERI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian konseptual kebijakan (conceptual policy study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan konseptual, relasi antar-aktor, serta implikasi kebijakan publik dalam konteks globalisasi digital dan shadow education pada pendidikan dasar di Indonesia. Kajian ini memadukan perspektif ekonomi pendidikan, ekonomi politik pendidikan, serta studi globalisasi pendidikan guna memahami dinamika nilai tambah (*value added*), kebocoran nilai (*value leakage*), dan dampak tata kelola kebijakan dalam ekosistem pendidikan dasar yang terdigitalisasi.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui studi literatur sistematis (*systematic literature study*). Literatur yang dikaji mencakup tiga kelompok utama. Pertama, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan pada rentang 2016–2026. Kedua, laporan lembaga internasional yang relevan, seperti OECD, UNESCO, World Bank, dan UNICEF, terutama yang memuat indikator pendidikan, ketimpangan pembelajaran, dan transformasi digital sektor publik. Ketiga, dokumen kebijakan nasional serta laporan resmi pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan dasar, digitalisasi pembelajaran, penguatan kompetensi literasi-numerasi, dan isu ketimpangan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka (*literature searching*) pada basis data ilmiah dan repositori publik yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi Google Scholar, SpringerLink, Taylor & Francis Online, SAGE Journals, serta portal OJS jurnal nasional. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti *globalization of education*, *economics of education*, *primary education*, *digital learning platforms*, dan *shadow education*, dengan penyesuaian istilah sesuai konteks Indonesia seperti pendidikan dasar, digitalisasi pendidikan, platform pembelajaran, dan bimbingan belajar/les privat. Kata kunci tersebut dipadukan menggunakan operator Boolean (AND/OR) untuk memastikan cakupan kajian yang komprehensif serta relevan dengan fokus penelitian.





Gambar 1. Alur Penelitian

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif dengan tahapan:

1. Klasifikasi literatur berdasarkan tema: globalisasi pendidikan dasar, platform digital, shadow education, ketimpangan pembelajaran, dan ekonomi pendidikan.
2. Identifikasi konsep kunci, seperti nilai tambah pendidikan, kebocoran nilai (value leakage), penangkapan nilai (value capturing), dan kedaulatan data pendidikan.
3. Sintesis konseptual, yaitu menghubungkan temuan lintas literatur untuk membangun kerangka analisis ekonomi pendidikan dasar yang kontekstual dengan kondisi Indonesia.
4. Penarikan implikasi kebijakan, dengan menekankan strategi yang berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan sistem pendidikan dasar.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini memerlukan kejelasan fokus analisis agar pembahasan tidak melebar serta tetap berada dalam kerangka konseptual ekonomi pendidikan dan ekonomi politik pendidikan. Oleh karena itu, konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai istilah teoritis, tetapi juga perlu diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih terukur secara kualitatif melalui indikator-indikator analitis. Dalam konteks penelitian kualitatif berbasis kajian konseptual kebijakan, proses ini dilakukan melalui langkah operasionalisasi konsep, yakni upaya merumuskan definisi operasional serta indikator pengamatan/analisis yang memungkinkan setiap konsep dapat diidentifikasi secara sistematis dalam literatur, dokumen kebijakan, maupun laporan lembaga.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperjelas batasan makna tiap konsep sehingga tidak terjadi tumpang tindih istilah; (2) memastikan keterkaitan konseptual antara globalisasi pendidikan, platformisasi pembelajaran digital, dan perkembangan shadow education pada pendidikan dasar; serta (3) membangun dasar analisis yang konsisten dalam mengidentifikasi dinamika nilai tambah (value added), kebocoran nilai (value leakage), dan penangkapan nilai (value capture) dalam ekosistem pendidikan dasar Indonesia. Dengan demikian, setiap konsep dalam penelitian ini diposisikan tidak hanya sebagai kerangka teoritis, melainkan sebagai variabel konseptual yang memiliki indikator analisis yang dapat ditelusuri dalam temuan literatur.

**Tabel 1.** Operasionalisasi Konsep Penelitian

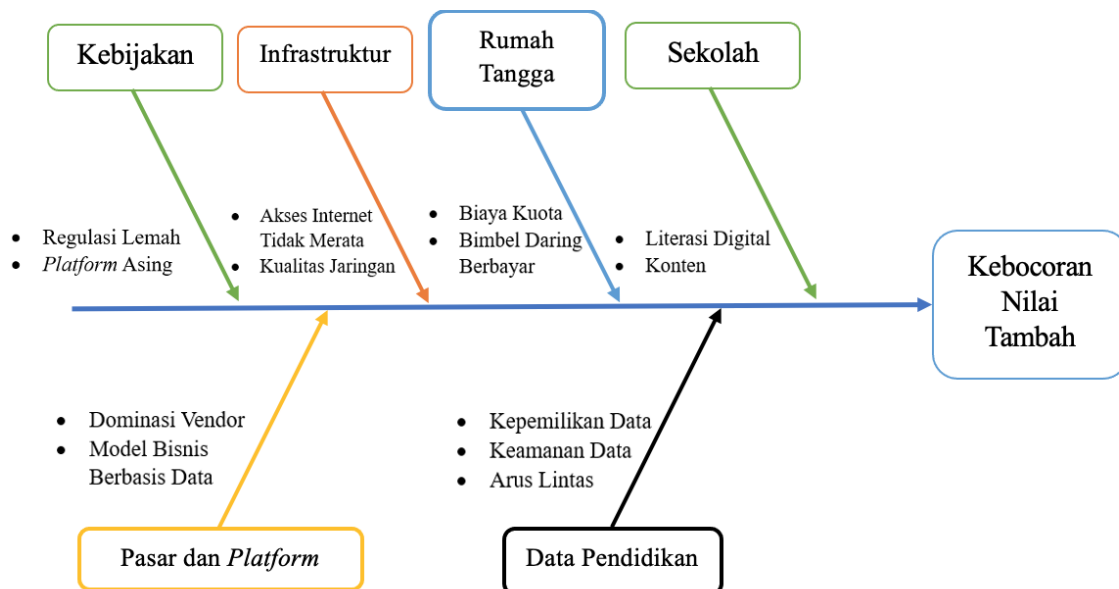
Konsep Utama	Definisi Operasional	Indikator Analisis	Sumber Literatur
--------------	----------------------	--------------------	------------------



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Globalisasi pendidikan dasar	Keterhubungan pendidikan dasar dengan mekanisme global melalui teknologi dan pasar	Platform digital, <i>shadow education</i> , standar mutu global	Marginson (2016); Rizvi & Lingard (2017)
Platform pembelajaran digital	Sistem dan aplikasi digital yang digunakan dalam pembelajaran	Ketergantungan platform, biaya berulang, pengelolaan data	Williamson (2017); Selwyn (2019)
Shadow education	Layanan pendidikan tambahan di luar sekolah formal	Beban biaya rumah tangga, ketimpangan akses	Bray (2017); Entrich (2020)
Kebocoran nilai tambah	Hilangnya manfaat ekonomi pendidikan ke luar sistem nasional	Ketergantungan vendor, aliran data, komersialisasi	Komljenovic (2019); Verger et al. (2021)
Penangkapan nilai tambah	Upaya menjaga nilai ekonomi pendidikan tetap berada dalam sistem nasional	Regulasi, konten lokal, tata kelola data	UNESCO (2021)



Gambar 2. Faktor-faktor Penyebab Kebocoran Nilai Tambah

1. Kanal Globalisasi yang Paling Nyata pada Pendidikan Dasar

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa globalisasi pada pendidikan dasar di Indonesia termanifestasi terutama melalui dua kanal utama, yaitu platform pembelajaran digital dan shadow education. Kedua kanal



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

tersebut tidak dapat dipahami sekadar sebagai inovasi pedagogis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pasar pendidikan yang mempengaruhi struktur biaya pendidikan, perubahan pola konsumsi pendidikan rumah tangga, serta dinamika relasi peran antara negara, sekolah, dan aktor non-negara. Dengan demikian, globalisasi pada pendidikan dasar tidak hadir terutama dalam bentuk perlintasan geografis atau mobilitas lintas negara secara fisik, melainkan melalui penetrasi logika ekonomi global ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari pada tingkat sekolah dasar.

Platform pembelajaran digital memperkenalkan bentuk-bentuk baru penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh model layanan berbasis langganan (subscription), penggunaan analitik pembelajaran (learning analytics), dan pengelolaan data pendidikan sebagai aset yang bernilai ekonomi tinggi. Temuan ini selaras dengan analisis Williamson [10] dan Selwyn [11] yang menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak pernah bersifat netral; ia membawa logika efisiensi pasar, skala ekonomi, serta kecenderungan ekstraksi data. Dalam konteks tersebut, platform pembelajaran digital bukan sekadar alat bantu guru, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur produksi pendidikan yang memungkinkan pengendalian terhadap alur pembelajaran, evaluasi, dan pemantauan capaian peserta didik.

Lebih jauh, melalui platformisasi, sebagian fungsi pedagogis sekolah seperti penyediaan materi ajar, pelaksanaan penilaian, hingga monitoring perkembangan murid mengalami pergeseran ke dalam ekosistem teknologi yang dikendalikan penyedia layanan digital. Kondisi ini mengarah pada bentuk ketergantungan institusional, terutama ketika sekolah tidak memiliki kapasitas untuk membangun sistem digital pembelajaran mandiri atau mengintegrasikan layanan lintas platform secara fleksibel. Ketergantungan ini diperkuat oleh fenomena vendor lock-in, yakni situasi ketika sekolah atau satuan pendidikan menjadi terkunci pada satu vendor/platform karena kendala kompatibilitas sistem, biaya migrasi, maupun keterikatan data. Dalam kerangka ekonomi politik pendidikan, vendor lock-in berimplikasi pada melemahnya kedaulatan penyelenggaraan pendidikan dasar dan meningkatnya dominasi aktor non-negara dalam proses pedagogis.

Sementara itu, shadow education berkembang sebagai pasar pendidikan pelengkap yang semakin terstandarisasi, terdigitalisasi, dan beroperasi dengan logika kompetisi yang terkait dengan dinamika global. Bray dan Entrich menegaskan bahwa shadow education merupakan fenomena global yang berfungsi sebagai “sistem bayangan” pendidikan formal. Sistem ini memiliki karakteristik utama berupa keseragaman orientasi hasil (outcome-oriented), penekanan pada pencapaian nilai, serta penyediaan kurikulum paralel yang mengikuti bahkan terkadang melampaui sekolah formal. Dalam konteks Indonesia, layanan bimbingan belajar (baik luring maupun daring) tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari strategi sistematis rumah tangga untuk meningkatkan performa akademik anak sejak pendidikan dasar [12], [13]

Transformasi shadow education di Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan baru, yaitu pergeseran dari layanan privat tradisional menjadi model pembelajaran yang lebih komersial dan terdigitalisasi, melalui bimbel online, modul berlangganan, kelas intensif berbasis target, serta tutor berbasis platform. Secara ekonomi pendidikan, fenomena ini menandai peningkatan peran rumah tangga sebagai pembiaya utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak di luar sekolah. Padahal, pada sistem pendidikan dasar idealnya negara dan sekolah memiliki mandat utama dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan. Akibatnya, shadow education membentuk diferensiasi kesempatan belajar (learning opportunity), karena siswa dari keluarga mampu memperoleh input tambahan, sedangkan kelompok rentan tidak memiliki akses yang sama.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa globalisasi pendidikan dasar bekerja melalui mekanisme pasar yang bersifat tidak langsung namun berdampak nyata terhadap struktur dan dinamika sistem pendidikan. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi dengan perubahan fundamental cara pendidikan diproduksi, dikonsumsi, dan dinilai dalam logika ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan dasar mengalami proses marketization dan platformization, di mana layanan publik pendidikan secara bertahap menjadi arena keterlibatan aktor privat, sekaligus memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber belajar berkualitas. Oleh sebab itu, globalisasi digital pada pendidikan dasar perlu dipahami bukan semata perubahan teknis pedagogik, tetapi sebagai perubahan tata kelola dan struktur pembiayaan pendidikan yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap keadilan pendidikan.

## 2. Dampak Ekonomi Globalisasi terhadap Pendidikan Dasar

Dampak ekonomi globalisasi pendidikan dasar bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami secara hitam putih, karena menghadirkan sekaligus peluang (*value added*) dan risiko (*value leakage*) dalam



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

penyelenggaraan layanan pendidikan dasar. Globalisasi yang masuk melalui platform pembelajaran digital dan *shadow education* memperluas ekosistem pendidikan sehingga proses belajar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sekolah formal. Kondisi ini mendorong terbentuknya pola konsumsi pendidikan baru yang ditandai oleh bertambahnya aktor penyedia layanan pendidikan, meningkatnya peran rumah tangga, serta berkembangnya mekanisme pasar pendidikan yang semakin kompleks.

Di satu sisi, globalisasi melalui platform pembelajaran digital dan *shadow education* menciptakan nilai tambah dalam bentuk peningkatan akses terhadap sumber belajar yang lebih beragam, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan individual murid. Anak dapat memperoleh materi penguatan literasi dan numerasi secara mandiri melalui konten video, latihan soal digital, maupun modul pembelajaran berbasis aplikasi yang sebelumnya tidak tersedia secara luas. Sekolah pun memperoleh peluang untuk melakukan inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, konten digital, dan sumber belajar eksternal yang memungkinkan percepatan transformasi praktik pedagogik. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, fenomena ini menunjukkan terjadinya perluasan input pendidikan (*educational inputs*) yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar, terutama bagi murid yang memiliki akses memadai terhadap perangkat dan internet.

Namun, di sisi lain, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa globalisasi pendidikan dasar juga memunculkan kecenderungan meningkatnya biaya pendidikan rumah tangga. Beban biaya tersebut mencakup biaya perangkat digital (telepon pintar, laptop, tablet), biaya akses internet, pembelian kuota, hingga langganan aplikasi pembelajaran, serta pembayaran layanan bimbingan belajar dan tutor privat. Peningkatan biaya tersebut menjadikan rumah tangga sebagai aktor pembiaya penting dalam proses pendidikan dasar, sehingga terjadi pergeseran beban dari negara menuju keluarga. Literatur ekonomi pendidikan menggarisbawahi bahwa biaya-biaya ini tidak otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran secara merata, sebab manfaat digitalisasi pendidikan cenderung terkonsentrasi pada kelompok sosial ekonomi yang mampu memenuhi input tambahan tersebut. Akibatnya, globalisasi pendidikan berpotensi memperlebar ketimpangan mutu (*quality gap*) dan ketimpangan kesempatan belajar (*opportunity gap*) antar kelompok sosial ekonomi.

Kecenderungan ini sejalan dengan argumentasi bahwa globalisasi pendidikan sering kali memperkuat peran pasar dalam menentukan mutu layanan pendidikan, terutama ketika negara tidak memiliki mekanisme regulasi dan perlindungan yang memadai. Dalam kondisi demikian, mutu pendidikan menjadi semakin ditentukan oleh daya beli dan pilihan konsumsi rumah tangga, bukan oleh pemerataan layanan pendidikan publik. Verger, Fontdevila, dan Zancajo menegaskan bahwa proses marketisasi pendidikan dapat menggeser orientasi pendidikan dari fungsi publik menuju rasionalitas pasar, di mana kompetisi, komodifikasi, dan privatisasi menjadi ciri dominan dalam ekosistem pendidikan [14].

Selain dimensi pembiayaan, globalisasi pendidikan dasar juga mendorong ketergantungan struktural terhadap penyedia layanan non-negara, khususnya platform teknologi dan industri pembelajaran privat. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat teknis, misalnya penggunaan aplikasi tertentu untuk asesmen dan pengelolaan kelas, tetapi juga bersifat institusional karena sekolah semakin bergantung pada platform untuk penyediaan materi ajar, evaluasi pembelajaran, serta penyimpanan data peserta didik. Dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut berpotensi melahirkan fenomena *vendor lock-in*, yaitu ketika sekolah sulit melepaskan diri dari platform tertentu karena keterbatasan alternatif, keterikatan sistem, dan tingginya biaya transisi. Situasi ini dapat melemahkan kapasitas sekolah untuk mengembangkan sistem pembelajaran mandiri serta menurunkan otonomi penyelenggaraan pendidikan dasar dalam jangka panjang.

Implikasi lebih luas dari kondisi ini adalah adanya pergeseran peran negara dan sekolah sebagai penyedia utama pendidikan dasar. Ketika pendidikan dasar semakin bergantung pada ekosistem privat—baik melalui platform pembelajaran digital maupun *shadow education* orientasi pendidikan berpotensi bergeser dari kepentingan publik (*public goods*) menuju kepentingan pasar (*market-driven*). Akibatnya, pendidikan dasar tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai layanan yang menjamin pemerataan, melainkan sebagai arena kompetisi yang semakin ditentukan oleh kapasitas ekonomi rumah tangga dan dominasi aktor non-negara. Oleh karena itu, tantangan kebijakan publik yang muncul adalah bagaimana negara mampu menjaga pendidikan dasar tetap berada dalam kerangka keadilan sosial, termasuk melalui penguatan regulasi platform, perlindungan data anak, dan pengembangan kapasitas sekolah agar tidak terjebak dalam kebocoran nilai tambah pendidikan.

**Tabel 2.** Dampak Ekonomi Globalisasi pada Pendidikan Dasar

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
-------	----------------	----------------



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Akses belajar	Sumber belajar lebih beragam dan fleksibel	Akses sangat bergantung pada daya beli keluarga (OECD, 2019)
Biaya pendidikan	Efisiensi waktu dan fleksibilitas belajar	Beban biaya rumah tangga meningkat secara signifikan (Bray & Lykins, 2019)
Peran sekolah	Mendorong inovasi dan adopsi teknologi	Subordinasi peran sekolah oleh mekanisme pasar (Komljenovic, 2019)
Keadilan sosial	Peluang personalisasi pembelajaran	Ketimpangan mutu antarmurid semakin melebar (OECD, 2023)
Tata kelola	Digitalisasi sistem pendidikan	Ketergantungan jangka panjang pada platform (Selwyn, 2019)

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa globalisasi pendidikan dasar tidak bersifat netral secara ekonomi. Globalisasi menciptakan distribusi manfaat dan beban yang tidak merata, di mana kelompok dengan daya beli lebih tinggi cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan kelompok rentan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kondisi ini berpotensi menggeser pendidikan dasar dari instrumen pemerataan sosial menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan, sehingga bertentangan dengan fungsi dasar pendidikan sebagai merit good dan hak publik.

## Pembahasan

### 1. Pendidikan Dasar sebagai Arena “Value Leakage”

Temuan bahwa pendidikan dasar berfungsi sebagai arena kebocoran nilai tambah (*value leakage*) dapat dipahami sebagai pergeseran lokasi produksi dan kepemilikan nilai ekonomi pendidikan. Nilai ekonomi pendidikan dasar tidak hanya berasal dari pembiayaan publik (misalnya anggaran operasional dan program digitalisasi), tetapi juga dari kerja guru (penyusunan materi, interaksi pedagogis, evaluasi), waktu belajar murid, serta data pembelajaran yang tercipta dari aktivitas belajar harian. Dalam kerangka ekonomi pendidikan, nilai-nilai tersebut seharusnya memperkuat sistem nasional melalui peningkatan kapasitas sekolah, penguatan kompetensi guru, dan pemerataan mutu. Namun, dalam praktik globalisasi digital, nilai tersebut dapat mengalir keluar melalui mekanisme pasar.

Secara lebih rinci, kebocoran nilai tambah pada pendidikan dasar terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, kebocoran finansial langsung, yaitu biaya berulang (langganan aplikasi, lisensi platform, pembelian konten, paket asesmen) yang terus-menerus dibayarkan oleh sekolah atau rumah tangga, tanpa membentuk aset kapasitas yang menetap di sekolah (misalnya bank konten lokal, sistem asesmen internal, atau keahlian pengembangan sistem). Kedua, kebocoran institusional melalui ketergantungan platform, ketika sekolah terikat pada format, ekosistem, atau pelatihan tertentu sehingga sulit bermigrasi tanpa biaya transisi tinggi (*vendor lock-in*). Dampaknya, daya tawar sekolah melemah dan arah inovasi pembelajaran cenderung mengikuti kepentingan penyedia layanan. Ketiga, kebocoran pedagogis, yaitu ketika materi dan asesmen siap pakai dari luar menggeser kreativitas dan otonomi guru, sehingga fungsi produksi pengetahuan di tingkat sekolah menurun. Keempat, kebocoran nilai dari data, ketika jejak digital pembelajaran menjadi sumber keuntungan pihak lain, sementara sekolah hanya menjadi “penghasil data” tanpa kontrol memadai atas pemanfaatannya.

Implikasi kebijakan dari temuan ini penting. Ketika kebocoran nilai terjadi, pendidikan dasar bergeser dari barang merit (merit good) menuju barang semi-privat (*quasi-private good*). Artinya, meskipun sekolah dasar tetap diselenggarakan negara, kualitas pembelajaran yang “kompetitif” semakin ditentukan oleh akses layanan tambahan berbasis pasar. Pada titik ini, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya memperluas akses teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa digitalisasi menciptakan penangkapan nilai (*value*



capturing) bagi sistem nasional, misalnya melalui standar interoperabilitas, penguatan konten lokal, dan tata kelola pengadaan yang menghindari ketergantungan tunggal.

## 2. Shadow Education sebagai Globalisasi “Tak Kasatmata”

Shadow education pada pendidikan dasar merupakan bentuk globalisasi yang “tak kasatmata” karena globalisasi tidak tampil sebagai perpindahan lintas negara, melainkan sebagai penyerapan logika global ke dalam perilaku konsumsi pendidikan rumah tangga. Logika tersebut ditandai oleh kompetisi capaian, pengukuran hasil yang serba terstandarisasi, serta keyakinan bahwa pendidikan adalah investasi privat yang harus menghasilkan keunggulan komparatif. Maka, shadow education bukan sekadar “opsi tambahan”, tetapi menjadi bagian dari struktur ekonomi pendidikan yang memproduksi stratifikasi sosial sejak usia dini.

Secara mekanisme, shadow education bekerja melalui tiga dorongan utama. Pertama, dorongan reputasi dan kompetisi, yaitu ketika keluarga merasa perlu menambah jam belajar agar anak tidak tertinggal, terutama dalam lingkungan yang menilai capaian akademik sebagai indikator utama keberhasilan. Kedua, dorongan ketidakpercayaan terhadap kecukupan sekolah, yaitu persepsi bahwa sekolah hanya memberi “standar minimum”, sedangkan pematapan kompetensi harus dicapai melalui bimbingan eksternal. Ketiga, dorongan platformisasi, yaitu perubahan model bimbingan belajar dari layanan tatap muka lokal menjadi layanan terstandarisasi, terdigitalisasi, dan dipasarkan secara luas melalui paket langganan, kelas daring, serta promosi berbasis perargetan.

Dampak ekonominya terlihat dalam bentuk pemisahan jalur mutu (dual-track quality). Murid yang memiliki akses pada bimbingan belajar berkualitas (atau konten premium) memperoleh peningkatan peluang capaian, sementara murid yang tidak mampu membayar cenderung bergantung pada layanan sekolah semata. Akibatnya, ketimpangan mutu tidak hanya terjadi antarsekolah, tetapi juga di dalam kelas yang sama, karena sumber belajar dan dukungan akademik murid berbeda-beda. Lebih jauh, shadow education dapat mendorong sekolah menjadi subordinat: sekolah menjadi “ruang formal”, sementara penguatan kompetensi utama berlangsung di luar sekolah melalui mekanisme pasar.

Karena itu, memahami shadow education sebagai globalisasi “tak kasatmata” berarti melihat bahwa isu ini bukan sekadar preferensi orang tua, melainkan soal tata kelola sistem. Kebijakan yang relevan bukan melarang bimbingan belajar, tetapi mengurangi ketergantungan terhadapnya melalui penguatan pembelajaran bermutu di sekolah, dukungan remedial berbasis sekolah, serta regulasi iklan dan klaim mutu layanan pendidikan tambahan agar tidak menyesatkan publik.

## 3. Data Pendidikan sebagai Sumber Nilai Ekonomi Baru

Poin penting lainnya adalah posisi data pendidikan dasar sebagai sumber nilai ekonomi baru. Pada ekosistem digital, data bukan sekadar arsip, melainkan resource yang dapat diolah menjadi nilai: untuk pengembangan produk pembelajaran, personalisasi materi, prediksi capaian, hingga perancangan layanan berbayar. Data aktivitas belajar (frekuensi latihan, waktu akses, pola kesalahan), capaian akademik (nilai, progres), dan perilaku belajar (ketekunan, keterlibatan) dapat membentuk profil belajar yang bernilai tinggi secara ekonomi dan strategis.

Masalahnya, data pendidikan dasar memiliki karakter khusus: ia dihasilkan dari interaksi murid yang masih berada pada usia dini dan sebagian besar aktivitasnya berlangsung dalam kerangka layanan publik. Karena itu, data pendidikan dasar seharusnya diperlakukan sebagai aset publik yang harus dilindungi, bukan sekadar komoditas. Tanpa tata kelola yang kuat, terdapat tiga risiko utama. Pertama, risiko kebocoran nilai tambah, ketika data publik digunakan untuk keuntungan komersial pihak tertentu tanpa adanya manfaat balik yang setara bagi sekolah dan sistem nasional. Kedua, risiko ketergantungan ekosistem, ketika analitik pembelajaran dan manajemen data hanya dapat dilakukan melalui platform tertentu sehingga sekolah tidak memiliki otonomi data. Ketiga, risiko kedaulatan, yakni ketika arus penyimpanan dan pemrosesan data berada di luar kontrol sistem nasional, sehingga kebijakan pendidikan berbasis data dapat dipengaruhi kepentingan eksternal.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya “arsitektur tata kelola data pendidikan dasar” yang jelas, setidaknya mencakup: (1) definisi kepemilikan dan hak akses data; (2) standar interoperabilitas dan portabilitas; (3) transparansi pemanfaatan data; (4) audit keamanan; dan (5) aturan pemanfaatan data untuk kepentingan riset dan inovasi yang tetap berpihak pada kepentingan publik. Dengan cara ini, data pendidikan



dapat menjadi sarana penangkapan nilai (value capturing): meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperkuat kebijakan berbasis bukti, bukan menjadi sumber kebocoran nilai tambah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam ekonomi pendidikan dasar di Indonesia, terutama melalui penetrasi platform pembelajaran digital dan shadow education. Kedua kanal tersebut tidak lagi sekadar inovasi pedagogis, melainkan berkembang menjadi mekanisme pasar pendidikan yang memengaruhi struktur biaya, pola konsumsi pendidikan rumah tangga, serta relasi peran antara negara, sekolah, dan aktor non-negara. Globalisasi pendidikan dasar berlangsung bukan melalui lintas negara secara fisik, melainkan melalui internalisasi logika ekonomi global dalam praktik pembelajaran sehari-hari di tingkat sekolah dasar.

Temuan utama menunjukkan bahwa pendidikan dasar mulai berfungsi sebagai arena kebocoran nilai tambah (value leakage), di mana nilai ekonomi yang tercipta dari anggaran publik, kerja guru, waktu belajar murid, dan data pendidikan tidak sepenuhnya tinggal dalam sistem nasional, tetapi mengalir kepada aktor pasar. Kondisi ini menandai pergeseran pendidikan dasar dari barang merit (merit good) menuju barang semi-privat (quasi-private good), dengan mutu pembelajaran semakin ditentukan oleh kemampuan membeli layanan tambahan. Shadow education beroperasi sebagai globalisasi “tak kasatmata” yang memperkuat ketimpangan berbasis daya beli. Selain itu, data pendidikan muncul sebagai sumber nilai ekonomi baru yang strategis, namun berpotensi melemahkan kedaulatan pendidikan jika tidak diatur melalui tata kelola yang kuat. Tanpa intervensi kebijakan yang memadai, globalisasi digital berisiko menggeser fungsi pendidikan dasar dari instrumen pemerataan sosial menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan regulasi pendidikan digital melalui interoperabilitas, portabilitas data, dan pencegahan ketergantungan platform; (2) penguatan kapasitas sekolah melalui pengembangan konten lokal, asesmen berbasis sekolah, dan peningkatan literasi digital guru; (3) pengelolaan shadow education dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, layanan remedial/pengayaan berbasis sekolah, serta regulasi klaim mutu layanan; (4) penempatan tata kelola data pendidikan sebagai isu strategis ekonomi pendidikan; serta (5) penelitian lanjutan berbasis studi empiris/studi kasus daerah untuk mengukur kebocoran dan penangkapan nilai tambah secara lebih konkret.

#### REFERENSI

- [1] Q. Aini, A. Kurniawan, and T. B. Sulistiyowati, “Digital Transformation: Best Practices of Educational Platform in Indonesia,” *Jurnal Transformative*, vol. 10, no. 1, pp. 42–59, 2024.
- [2] D. Yulianto, “A bridging the digital divide in education: disparities in Google classroom utilization and technical challenges among urban and rural teachers,” *Journal of Education Technology*, vol. 9, no. 2, pp. 258–270, 2025.
- [3] U. Halim and N. Hidayat, “The Sequential Levels of the Digital Divide in the Educational Domain Among Indonesian University Students,” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, vol. 10, no. 1, pp. 179–208, 2025.
- [4] UNESCO., *Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state Actors in Education: Who Chooses? Who Loses?*. UN, 2022.
- [5] M. Hazin, M. T. Yani, S. Trihantoyo, R. Rusdinal, S. Sulastri, and N. W. D. Rahmawati, “Analyzing Digitalization in Education Policy in Indonesia through the Policy Analysis Triangle Model,” *Journal of Posthumanism*, vol. 5, no. 1, pp. 998–1011, 2025.
- [6] M. Badaruddin, F. K. Muhandi, and H. Jofanda, “Digital Education Inequality and Youth Social Mobility in Indonesia’s 3T Regions,” *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, vol. 1, no. 2, pp. 31–41, 2025.
- [7] W. Zhang, “Shadow Education in East Asia: Interactions between Government Policy and Private Supplementary Tutoring,” 2018.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [8] N. P. Fitriani, A. E. J. K. Nugroho, I. F. Samsiyah, A. R. Fitriyani, and A. Kusbiarsi, "THE IMPACT OF DIGITAL LEARNING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF EDUCATION IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, vol. 14, no. 4, pp. 3142–3154, 2025.
- [9] R. Jayanthi and A. Dinaseviani, "Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19," *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, vol. 24, no. 2, pp. 187–200, 2022.
- [10] B. Williamson, "Big data in education: The digital future of learning, policy and practice," 2017.
- [11] N. Selwyn, *Should robots replace teachers?: AI and the future of education*. John Wiley & Sons, 2019.
- [12] S. R. Entrich, *Shadow education and social inequalities in Japan: Evolving patterns and conceptual implications*. Springer, 2017.
- [13] M. Bray and A. Hajar, *Shadow education in the Middle East: Private supplementary tutoring and its policy implications*. Taylor & Francis, 2023.
- [14] A. Verger, C. Fontdevila, and A. Zancajo, *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press, 2016.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2286

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).